



ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH (APBD) (Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2015-2024)

Isnaini Nur Azizah, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This research aims to evaluate the regional financial performance of Sukoharjo Regency over ten years (2015–2024) using a financial ratio approach across revenue, expenditure, and financing sectors. The research methodology uses secondary data from BPKPAD financial reports, processed using a descriptive-quantitative approach with analytical instruments, including variance, growth, effectiveness, efficiency, and harmony ratios, along with a financing analysis of SiLPA and Reserve Funds. The results indicate that Sukoharjo Regency maintains a high level of fiscal dependency on the central government, characterized by the dominance of Transfer Revenues in the regional budget (APBD) structure, averaging 74.49% relative to the contribution of Regional Original Revenue (PAD), with a fiscal independence ratio of only 30.21%.

In terms of expenditure, the study identifies fiscal rigidity, marked by a massive dominance of Operating Expenditure, which reached a peak of 87.91% in 2024, while Capital Expenditure was at its lowest point at 12.07%. Although budget absorption is considered highly efficient, with a 94.44% ratio, the excessive volume of routine spending has created liquidity pressures in the financing sector. This is empirically supported by a negative growth trend in SiLPA of -25.15% and a consistent year-over-year decline in the Reserve Fund balance. Furthermore, the impact of the COVID-19 pandemic during 2020–2022 exacerbated this structural imbalance through refocusing policies that hindered long-term infrastructure investment. This research concludes that a structural reform of expenditure and the optimization of fiscal independence are imperative to ensure the sustainability of regional development.

Keywords: Regional Financial Performance, Financial Ratio Analysis, Regional Budget Management

PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Keuangan RI yang dikutip dalam Kompas (2024), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya menunjukkan manajemen keuangan pemerintah daerah, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, penting untuk mengelola APBD dengan baik untuk memastikan bahwa APBD dapat membantu pemerintah merencanakan dan juga mengatur penerimaan dan belanja daerah dalam mencapai tujuan fiskal. Menurut data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dikutip dalam TribunJateng (2024) mengenai hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo menjadi daerah paling maju, berada di peringkat 5 secara keseluruhan dengan skor 4,11.

Analisis tren kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi APBD antarperiode waktu. Dalam konteks evaluasi implementasi otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu kunci utama yang merefleksikan tingkat kemandirian dan kebijakan fiskal daerah. Merujuk pada riset yang dilakukan oleh Rahmayati (2016), ketidakmandirian fiskal Kabupaten Sukoharjo terindikasi dari hasil evaluasi kinerja keuangan daerah menggunakan rasio efisiensi, efektivitas, kemandirian, pertumbuhan, dan analisis tren. Temuan utama menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan serta pembangunan wilayah masih sangat

¹ Corresponding author

bergantung pada kontribusi transfer pusat dan sumber eksternal lainnya pada tahun 2011 sampai 2013. Sementara, penelitian ini bertujuan untuk memperbarui menggunakan periode 2015 sampai 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2024

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah	Surplus/Defisit
2015	1.784.106.364.462,00	313.947.492.011,00	944.640.592.926,00	1.519.776.477.018,00	148.804.097.444,00
2016	1.931.896.575.824,00	363.163.428.162,00	1.246.954.769.893,00	1.650.404.440.343,00	52.035.690.481,00
2017	2.055.571.033.667,00	464.567.409.857,00	1.217.877.693.551,00	1.581.523.010.006,00	168.067.748.661,00
2018	2.055.517.963.074,00	433.485.481.219,00	1.219.811.099.454,00	1.740.840.296.519,00	5.356.059.555,00
2019	2.143.687.569.516,00	458.742.223.869,00	1.241.762.236.865,00	1.776.147.006.513,00	29.538.208.003,00
2020	2.040.394.761.328,00	469.540.567.890,00	1.163.627.289.398,00	1.727.809.331.309,00	(32.686.205.581,00)
2021	2.119.633.370.538,00	528.354.094.902,00	1.151.058.014.075,00	1.756.972.447.254,00	30.177.811.684,00
2022	2.014.858.262.409,00	495.282.321.890,00	1.169.352.583.422,00	1.696.793.753.977,00	(27.169.552.568,00)
2023	2.160.890.181.591,00	537.102.489.624,00	1.242.281.496.696,00	1.858.135.702.478,00	(74.536.610.887,00)
2024	2.241.420.563.371,00	553.602.937.171,00	1.294.460.963.380,00	1.944.100.435.034,00	(109.071.929.083,00)

Sumber: Diolah peneliti (BPKPAD Kabupaten Sukoharjo)

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 sampai 2024 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo mengalami tren turun sebesar Rp 33,07 miliar dari Rp 528,35 miliar menjadi Rp 495,28 miliar. Kemudian, dana perimbangan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015 sampai 2024 lebih besar daripada pendapatan asli daerah (PAD). Tingginya porsi dana perimbangan dalam anggaran daerah menunjukkan kontribusi pendapatan eksternal yang melampaui kemampuan fiskal internal yang bersumber dari PAD. Kabupaten Sukoharjo mengalami defisit anggaran daerah pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024. Ini karena pendapatan daerah lebih rendah daripada pengeluaran/belanja daerah. Pendapatan yang rendah menekankan bahwa sumber keuangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk daerah tersebut. APBD menentukan naik turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah (Wulandari dkk., 2023).

Analisis tren kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi APBD antarperiode waktu. Dalam konteks evaluasi implementasi otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu kunci utama yang merefleksikan tingkat kemandirian dan kebijakan fiskal daerah. Data pada Tabel 1 diperkuat oleh pernyataan dari Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah (2025). Bisa disimpulkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sukoharjo sebanding dengan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Dengan kontribusi PAD sebesar 26,57% dan dominasi transfer mencapai 73,43% dari total pendapatan daerah, dapat disimpulkan bahwa daerah ini masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Sehingga bertolak belakang dengan prinsip dasar bahwa PAD seharusnya menjadi sumber utama pembiayaan APBD, mengingat semakin besar porsi PAD akan semakin memperkuat kemandirian daerah (Sari & Riharjo, 2020).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan indikator pengukuran pada tiga bagian analisis kinerja keuangan APBD yang dapat digunakan

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah salah satu teori organisasional paling penting yang memberikan dampak pada perjanjian kontrak antara prinsipal dan juga agen, baik individual maupun entitas yang bekerja sama secara legal. Dalam jurnalnya, Jensen & Meckling (1976) menjelaskan tentang hubungan keagenan seperti perjanjian atau kontrak di mana suatu pihak (prinsipal) mengikutsertakan pihak lain (agen) guna mendelegasikan kekuasaan dalam penentuan keputusan untuk agen. Berdasarkan teori keagenan ini, ketika hubungan antara pihak adalah maksimalisasi utilitas, ada kemungkinan bahwa agen tidak bekerja demi tujuan terbaik untuk prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang memunculkan adanya konflik keagenan (*agency conflict*). Darmawan (2023) menambahkan bahwa pemisahan peran terjadi antara pemilik kepentingan (masyarakat) dan pengelola (pemerintah daerah). Konsekuensi wewenang ini adalah munculnya tuntutan akuntabilitas, di mana pemerintah daerah sebagai agen harus mempertanggungjawabkan pengelolaan APBD

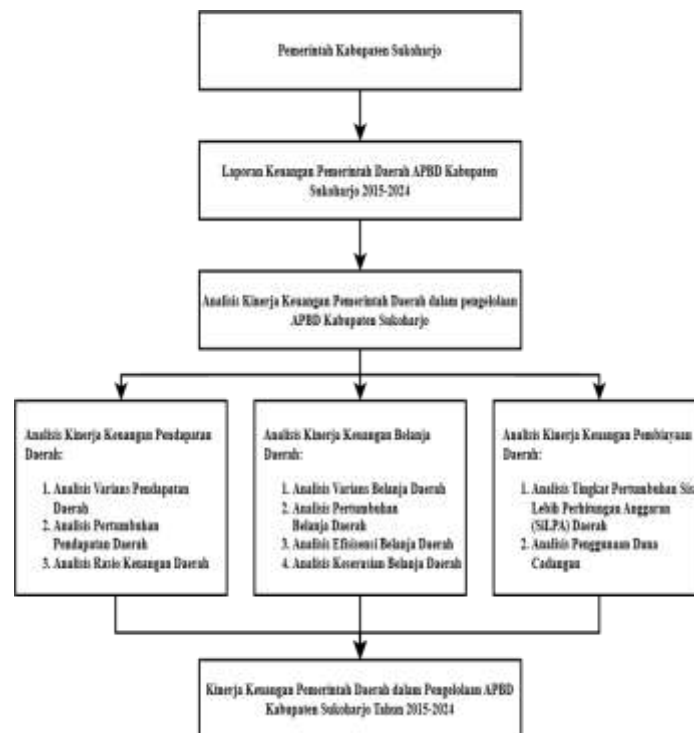
kepada masyarakat sebagai prinsipal. Sebagai imbal balik, masyarakat memberikan kompensasi berupa kepercayaan politik.

Dalam konteks sektor publik, ditegaskan bahwa akuntabilitas merupakan inti dari hubungan keagenan, di mana pemerintah daerah sebagai agen wajib memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, DPRD, maupun pemerintah pusat sebagai principal (Mardiasmo, 2021). Dalam penelitian ini, teori keagenan menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan tidak hanya menjadi alat ukur, melainkan juga instrumen akuntabilitas. Semakin tinggi tingkat ketergantungan fiskal, semakin rendah kemandirian daerah. Oleh sebab itu, tingkat ketergantungan fiskal menjadi tolak ukur penting sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan tugasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab (Dalisawintri dkk., 2025).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan keterkaitan antara beberapa indikator pengukuran. Penelitian ini memuat 9 indikator pengukuran pada tiga bagian analisis kinerja keuangan APBD yang dapat digunakan: analisis kinerja pendapatan, analisis kinerja belanja daerah, dan analisis kinerja pembiayaan.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, indikator-indikator yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi pada riset berikut ialah data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan juga Neraca Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam studi ini ialah purposive sampling pada data yang berupa laporan keuangan tahunan selama 10 tahun, yaitu 2015 sampai 2024. Pada riset ini, populasi yang selaras dengan kualifikasi adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
3. Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan

Indikator dan pengukuran

Pada studi ini, variabel yang digunakan hanya menggunakan indikator alat ukur untuk melihat kinerja keuangan, yaitu indikator statistik rasio (Tri, 2018). Penggunaan variabel indikator pada riset ini dikelompokkan dalam tiga aspek berupa: 1) aspek pendapatan; 2) aspek belanja; 3) aspek pembiayaan. Menggunakan 9 indikator dengan 14 rasio analisis (Mahmudi, 2019).

1) Analisis Varians Pendapatan

Apabila realisasi pendapatan melampaui target anggaran, maka selisih tersebut dikategorikan sebagai selisih yang menguntungkan (*favourable variance*). Sebaliknya, jika realisasi berada di bawah angka yang direncanakan, maka selisih tersebut merupakan selisih yang tidak diinginkan (*unfavourable variance*) (Mahmudi, 2019).

$$\text{Varians Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif/negatif (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\{X_t - X_{t-1}\}}{\{X_{t-1}\}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_t = Realisasi pendapatan pada tahun t ; X_{t-1} = Realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya.

Kriteria untuk pengukuran pertumbuhan yaitu: (1) jika angkanya naik, maka pertumbuhannya positif; (2) jika angkanya turun, maka pertumbuhannya negatif.

3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Besarnya kontribusi dana tersebut mencerminkan sejauh mana suatu daerah masih bergantung pada pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan fiskalnya, serta kemampuan daerah dalam mengelola sumber keuangannya sendiri guna mendanai berbagai aktivitas pembangunan (Patiroi, 2019).

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Nilai Ketergantungan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Rasio Ketergantungan Daerah

Presentase	Keterangan
<10%	Sangat Rendah
10% - 20%	Rendah
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup
40% - 50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber: Mahmudi (2019)

4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Semakin tinggi rasio kemandirian daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan sebaliknya (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Nilai rasio kemandirian kemandirian daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Rasio Kemandirian Daerah

Presentase	Keterangan
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Halim & Kususfi (2007)

5) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Apabila porsi PAD semakin besar, maka kapasitas pemerintah daerah juga meningkat seiring dengan berkurangnya ketergantungan pada sumber eksternal (Pasaribu, 2021).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Nilai derajat desentralisasi daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4 Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi

Presentase	Keterangan
<10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup
40% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Pasaribu dkk. (2021)

6) Rasio Efektivitas PAD

Kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai semakin baik apabila rasio efektivitasnya tinggi. Sebaliknya, rasio yang rendah mencerminkan kinerja keuangan yang masih perlu ditingkatkan (Melmambessy, 2022).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Nilai rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 5 Kriteria Rasio Efektivitas PAD

Presentase	Keterangan
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

7) Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai yang ditargetkan. Rasio ini dianggap sangat efektif apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2019).

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Nilai rasio Efektivitas Pajak Daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 6 Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Keterangan
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

8) Rasio Derajat BUMD

Semakin besar persentase kontribusi, semakin besar peranan BUMD dalam meningkatkan PAD (Mahmudi, 2019).

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Laba BUMD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Nilai rasio Derajat Kontribusi BUMD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 7 Kriteria Derajat Kontribusi BUMD

Presentase	Keterangan
< 10%	Sangat Rendah
10% - 20%	Rendah
21% - 30%	Sedang
31% - 40%	Cukup tinggi
> 40%	Tinggi

Sumber: Mahsun (2019)

9) Analisis Varians Belanja

Surplus realisasi merupakan kondisi yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan defisit adalah kondisi sebaliknya (*unfavourable variance*) (Mahmudi, 2019).

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

10) Analisis Pertumbuhan Belanja

Deviasi positif (surplus) merupakan kondisi yang diharapkan, sementara deviasi negatif (defisit) justru sebaliknya (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\{X_t - X_{\{t-1\}}\}}{\{X_{\{t-1\}}\}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_t = Realisasi belanja pada tahun t ; X_{t-1} = Realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Kriteria untuk pengukuran pertumbuhan yaitu: (1) jika angkanya naik, maka pertumbuhan positif; (2) jika angkanya turun, maka pertumbuhannya negatif.

11) Analisis Efisiensi Belanja

Pemerintah daerah dinilai telah menerapkan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya, jika lebih dari 100 persen mengindikasikan adanya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

12) Analisis Keserasian Belanja

a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Daerah yang secara fiskal lebih kuat pada umumnya mengalokasikan porsi belanja operasi yang lebih besar. Dalam praktiknya, porsi belanja operasi pemerintah daerah biasanya berkisar antara 60 hingga 90 persen dari total belanja (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Belanja modal tidak bersifat rutin. Belanja modal ini akan memengaruhi neraca pemerintah daerah, yakni melalui penambahan aset daerah. Pada umumnya, proporsi belanja modal terhadap belanja daerah berkisar antara 5% sampai 20% (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

13) Analisis Pertumbuhan SiLPA

$$\text{Rasio Pertumbuhan SiLPA} = \frac{\{X_t - X_{\{t-1\}}\}}{\{X_{\{t-1\}}\}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_t = SiLPA tahun t , X_{t-1} = SiLPA tahun sebelumnya (Mahmudi, 2019).

Kriteria untuk pengukuran pertumbuhan yaitu: (1) jika angkanya positif, maka terjadi pertumbuhan SiLPA; (2) jika angkanya negatif, maka terjadi penurunan SiLPA.

14) Analisis Penggunaan Dana Cadangan

Dana cadangan dapat terbentuk ketika terjadi surplus pada tahun yang dianggarkan. Untuk saat ini, ketika anggaran terdefisit, dana cadangan digunakan sebagai pengganti SiLPA (Aminatuzzuria dkk., 2025).

$$\text{Saldo Akhir} = \text{Saldo Awal Dana Cadang} + (\text{Pembentukan} - \text{Penggunaan})$$

Model Penelitian

Menurut Sugiyono (2023), Pada penentuan analisis kinerja keuangan, digunakan analisis deskriptif kuantitatif yang disusun dalam bentuk *time series* selama 10 tahun (2015-2024). Data sekunder didapatkan dengan metode dokumentasi melalui laporan keuangan daerah terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan PDRB pada BPKPAD Kabupaten Sukoharjo. Menggunakan metode analisis rasio keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek, yaitu Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015-2024. Adapun sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2 Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo

Sumber: Diolah peneliti (BPKPAD Kabupaten Sukoharjo)

Analisis Varians Pendapatan

Tabel 8 Rasio Varians Pendapatan

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio	Hasil Kriteria
2015	1.784.106.364.462,00	1.714.168.309.000,00	104,1%	Baik
2016	1.931.896.575.824,00	1.921.753.246.000,00	100,5%	Baik
2017	2.055.571.033.667,00	2.018.288.617.000,00	101,8%	Baik
2018	2.055.517.964.074,00	1.986.593.090.000,00	103,5%	Baik
2019	2.143.687.569.516,00	2.063.683.200.000,00	103,9%	Baik
2020	2.040.394.761.328,00	1.947.664.572.000,00	104,8%	Baik
2021	2.119.633.370.538,00	2.023.068.760.600,00	104,8%	Baik
2022	2.014.818.262.391,00	1.914.695.016.148,00	105,2%	Baik
2023	2.160.890.181.591,00	2.032.501.407.587,00	106,3%	Baik
2024	2.241.420.563.371,00	2.190.025.468.523,00	102,3%	Baik
Rata-rata			103,7%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Konsistensi pencapaian di atas 100% ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mampu mencapai target, tetapi juga secara berkelanjutan mampu melampauinya (*favorable variance*) yang diukur melalui rumus rasio varians (Mahmudi, 2019).

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 9 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Realisasi Pendapatan tahun t	Realisasi Pendapatan pada tahun t-1	Rasio	Hasil Kriteria
2015	1.784.106.364.462,00	1.570.745.025.149,00	13,58%	Positif
2016	1.931.896.575.824,00	1.784.106.364.462,00	8,28%	Positif
2017	2.055.571.033.667,00	1.931.896.575.824,00	6,40%	Positif
2018	2.055.517.964.074,00	2.055.571.033.667,00	0,00%	Stagnan
2019	2.143.687.569.516,00	2.055.517.964.074,00	4,29%	Positif
2020	2.040.394.761.328,00	2.143.687.569.516,00	-4,82%	Negatif
2021	2.119.633.370.538,00	2.040.394.761.328,00	3,88%	Positif
2022	2.014.818.262.391,00	2.119.633.370.538,00	-4,94%	Negatif

Tahun	Realisasi Pendapatan tahun t	Realisasi Pendapatan pada tahun t-1	Rasio	Hasil Kriteria
2023	2.160.890.181.591,00	2.014.818.262.391,00	7,25%	Positif
2024	2.241.420.563.371,00	2.160.890.181.591,00	3,73%	Positif
Rata-rata			3,77%	

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan, meskipun laju pertumbuhannya fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2024, dengan kenaikan rata-rata 3,77% per tahun. Menurut Mahmudi (2019) pertumbuhan negatif merupakan indikator kerentanan fiskal daerah terhadap faktor eksternal.

Rasio Ketergantungan Daerah

Tabel 10 Rasio Ketergantungan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio	Hasil Kriteria
2015	1.465.354.216.001,00	1.784.106.364.462,00	82,13%	Sangat Tinggi
2016	1.520.767.740.253,00	1.931.896.575.824,00	78,72%	Sangat Tinggi
2017	1.580.975.279.110,00	2.055.571.033.667,00	76,91%	Sangat Tinggi
2018	1.546.150.456.222,00	2.055.517.964.074,00	75,22%	Sangat Tinggi
2019	1.465.833.898.647,00	2.143.687.569.516,00	68,38%	Sangat Tinggi
2020	1.350.959.733.838,00	2.040.394.761.328,00	66,21%	Sangat Tinggi
2021	1.520.527.625.636,00	2.119.633.370.538,00	71,74%	Sangat Tinggi
2022	1.516.005.336.404,00	2.014.818.262.391,00	75,24%	Sangat Tinggi
2023	1.622.132.296.967,00	2.160.890.181.591,00	75,07%	Sangat Tinggi
2024	1.687.817.626.200,00	2.241.420.563.371,00	75,30%	Sangat Tinggi
Rata-rata			74,49%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Tingginya angka ini membuktikan bahwa peningkatan transfer juga dipicu oleh kenaikan belanja daerah. Total pendapatan daerah juga naik karena didorong oleh peningkatan PAD, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi yang bisa dilihat pada data PDRB tahun 2020-2024.

Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 11 Rasio Kemandirian Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio	Hasil Kriteria
2015	313.947.492.011,00	1.465.354.216.001,00	21,42%	Cukup
2016	363.163.428.162,00	1.520.767.740.253,00	23,88%	Cukup
2017	464.567.409.857,00	1.580.975.279.110,00	29,38%	Cukup
2018	433.485.481.219,00	1.546.150.456.222,00	28,04%	Cukup
2019	458.742.223.869,00	1.465.833.898.647,00	31,30%	Cukup
2020	469.540.567.890,00	1.350.959.733.838,00	34,76%	Cukup
2021	528.354.094.902,00	1.520.527.625.636,00	34,75%	Cukup
2022	495.282.321.890,00	1.516.005.336.404,00	32,67%	Cukup
2023	537.102.489.624,00	1.622.132.296.967,00	33,11%	Cukup
2024	553.602.937.171,00	1.687.817.626.200,00	32,80%	Cukup
Rata-rata			30,21%	Cukup

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan yang konsisten, dengan rata-rata rasio sebesar 30,21%. PAD tumbuh lebih cepat daripada transfer, sehingga proporsi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin besar.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 12 Analisis Rasio DDF

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio	Hasil Kriteria
2015	313.947.492.011,00	1.784.106.364.462,00	17,60%	Kurang
2016	363.163.428.162,00	1.931.896.575.824,00	18,80%	Kurang
2017	464.567.409.857,00	2.055.571.033.667,00	22,60%	Sedang
2018	433.485.481.219,00	2.055.517.964.074,00	21,09%	Sedang
2019	458.742.223.869,00	2.143.687.569.516,00	21,40%	Sedang



Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio	Hasil Kriteria
2020	469.540.567.890,00	2.040.394.761.328,00	23,01%	Sedang
2021	528.354.094.902,00	2.119.633.370.538,00	24,93%	Sedang
2022	495.282.321.890,00	2.014.818.262.391,00	24,58%	Sedang
2023	537.102.489.624,00	2.160.890.181.591,00	24,86%	Sedang
2024	553.602.937.171,00	2.241.420.563.371,00	24,70%	Sedang
Rata-rata			22,36%	Sedang

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

DDF Kabupaten Sukoharjo periode 2015 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan, yang berarti daerah sudah mulai menunjukkan kemampuan dalam membiayai pemerintah daerah, namun belum sepenuhnya mampu menopang pendapatan daerah secara mandiri sehingga masih memerlukan dukungan transfer pusat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi.

Rasio Efektivitas PAD

Tabel 13 Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Hasil Kriteria
2015	313.947.492.011,00	264.982.258.000,00	118,48%	Sangat Efektif
2016	363.163.428.162,00	314.896.567.000,00	115,33%	Sangat Efektif
2017	464.567.409.857,00	391.127.036.000,00	118,78%	Sangat Efektif
2018	433.485.481.219,00	348.388.683.000,00	124,43%	Sangat Efektif
2019	458.742.223.869,00	359.679.145.000,00	127,54%	Sangat Efektif
2020	469.540.567.890,00	342.723.550.000,00	137,00%	Sangat Efektif
2021	528.354.094.902,00	420.628.098.600,00	125,61%	Sangat Efektif
2022	495.282.321.890,00	393.788.841.068,00	125,77%	Sangat Efektif
2023	537.102.489.624,00	453.319.631.218,00	118,48%	Sangat Efektif
2024	553.602.937.171,00	486.633.326.543,00	113,76%	Sangat Efektif
Rata-rata			122,52	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Efektivitas PAD Kabupaten Sukoharjo selama periode 2015 sampai 2024 menunjukkan kinerja yang baik dengan rata-rata di atas 100% secara konsisten. Pada periode 2023 hingga 2024 terjadi penurunan rasio pada saat realisasi naik, bukti bahwa reformasi perencanaan anggaran berhasil. Kinerja PAD Sukoharjo secara operasional sangat baik (terbukti dari realisasi selalu di atas target), namun dari sisi perencanaan masih perlu perbaikan agar gap antara target dan realisasi lebih realistis.

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 14 Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rasio	Hasil Kriteria
2015	137.043.704.396,00	103.214.950.000,00	132,78%	Sangat Efektif
2016	182.010.505.527,00	138.000.000.000,00	131,89%	Sangat Efektif
2017	221.901.158.399,00	157.100.000.000,00	141,25%	Sangat Efektif
2018	235.894.522.749,00	169.300.000.000,00	139,34%	Sangat Efektif
2019	262.419.139.461,00	187.602.000.000,00	139,88%	Sangat Efektif
2020	235.186.691.560,00	167.475.000.000,00	140,43%	Sangat Efektif
2021	234.425.731.615,00	194.150.000.000,00	120,74%	Sangat Efektif
2022	286.451.988.069,00	214.250.000.000,00	133,70%	Sangat Efektif
2023	322.205.759.612,00	257.350.000.000,00	125,20%	Sangat Efektif
2024	325.763.944.615,00	275.850.000.000,00	118,09%	Sangat Efektif
Rata-rata			132,33%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Efektivitas pajak daerah dapat menjelaskan bahwa tahun 2015 sampai 2024 menunjukkan kinerja yang secara konsisten memenuhi kriteria sangat efektif dengan pencapaian rata-rata 132,33%. Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD) menetapkan bahwa daerah harus meningkatkan *local taxing power* dan menetapkan anggaran lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Rasio Kontribusi BUMD

Tabel 15 Rasio Kontribusi BUMD

Tahun	Penerimaan Laba BUMD	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Hasil Kriteria
2015	9.361.021.962,00	313.947.492.011,00	2,98%	Sangat Rendah
2016	11.388.912.261,00	363.163.428.162,00	3,14%	Sangat Rendah
2017	15.495.303.717,00	464.567.409.857,00	3,34%	Sangat Rendah
2018	20.894.425.195,00	433.485.481.219,00	4,82%	Sangat Rendah
2019	22.647.818.941,00	458.742.223.869,00	4,94%	Sangat Rendah
2020	33.757.900.228,00	469.540.567.890,00	7,19%	Sangat Rendah
2021	34.782.214.740,00	528.354.094.902,00	6,58%	Sangat Rendah
2022	39.098.713.731,00	495.282.321.890,00	7,89%	Sangat Rendah
2023	39.448.230.309,00	537.102.489.624,00	7,34%	Sangat Rendah
2024	42.298.309.636,00	553.602.937.171,00	7,64%	Sangat Rendah
Rata-rata			5,59%	Sangat Rendah

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Rasio derajat kontribusi laba BUMD menunjukkan tren pertumbuhan nominal yang selalu meningkat secara konsisten. Namun, secara kuantitatif, kontribusi BUMD terhadap PAD rata-rata hanya sebesar 5,59%. Pencapaian di bawah 10% ini telah menempatkan kontribusi BUMD selama sepuluh tahun terakhir dalam kategori sangat rendah (Mahmudi, 2019).

Analisis Varians Belanja

Tabel 16 Rasio Varians Belanja

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio	Hasil Kriteria
2015	1.519.776.477.018,00	1.814.943.436.000,00	83,74%	Baik
2016	1.650.404.440.343,00	1.928.844.453.000,00	85,56%	Baik
2017	1.581.523.010.006,00	2.011.075.275.000,00	78,64%	Baik
2018	1.740.840.296.519,00	1.975.489.848.000,00	88,12%	Baik
2019	1.776.147.006.513,00	2.112.858.325.000,00	84,06%	Baik
2020	1.727.809.331.309,00	2.035.445.880.000,00	84,89%	Baik
2021	1.756.972.447.254,00	2.022.353.558.000,00	86,88%	Baik
2022	1.696.793.753.977,00	1.900.041.942.902,00	89,30%	Baik
2023	1.858.135.702.478,00	1.965.365.358.063,00	94,54%	Baik
2024	1.944.100.435.034,00	2.058.474.057.054,00	94,44%	Baik
Rata-rata			87,2%	Baik

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Analisis terhadap Varians Belanja menunjukkan kinerja manajemen yang secara konsisten berada pada kriteria “baik” dengan rata-rata rasio 87,2%. Secara kuantitatif, kriteria ini dibuktikan dengan realisasi belanja yang tidak pernah melampaui total anggaran yang ditetapkan (*favourable variance*) sehingga mencerminkan adanya kedisiplinan fiskal dalam menjaga pengeluaran daerah.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel 17 Rasio Pertumbuhan Belanja

Tahun	Realisasi Belanja tahun t	Realisasi Belanja pada tahun t-1	Rasio	Hasil Kriteria
2015	1.519.776.477.018,00	1.466.031.332.160,00	3,67%	Positif
2016	1.650.404.440.343,00	1.519.776.477.018,00	8,60%	Positif
2017	1.581.523.010.006,00	1.650.404.440.343,00	-4,17%	Negatif
2018	1.740.840.296.519,00	1.581.523.010.006,00	10,07%	Positif
2019	1.776.147.006.513,00	1.740.840.296.519,00	2,03%	Positif
2020	1.727.809.331.309,00	1.776.147.006.513,00	-2,72%	Negatif
2021	1.756.972.447.254,00	1.727.809.331.309,00	1,69%	Positif
2022	1.696.793.753.977,00	1.756.972.447.254,00	-3,43%	Negatif
2023	1.858.135.702.478,00	1.696.793.753.977,00	9,51%	Positif
2024	1.944.100.435.034,00	1.858.135.702.478,00	4,63%	Positif
Rata-rata			2,99%	Positif

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Analisis pertumbuhan belanja menunjukkan dinamika kinerja yang fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,99%. Secara kuantitatif, tren pertumbuhan yang positif mendominasi pertumbuhan ini. Pertumbuhan belanja yang naik dan turun menerapkan prinsip keadilan anggaran. Meskipun PAD terus naik, tidak semua kenaikan pendapatan dialokasikan untuk belanja. Sebagian dialokasikan untuk SiLPA dan Dana Cadangan.

Analisis Efisiensi Belanja

Tabel 18 Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio	Hasil Kriteria
2015	1.519.776.477.018,00	1.814.943.436.000,00	83,74%	Efisien
2016	1.650.404.440.343,00	1.928.844.453.000,00	85,56%	Efisien
2017	1.581.523.010.006,00	2.011.075.275.000,00	78,64%	Efisien
2018	1.740.840.296.519,00	1.975.489.848.000,00	88,12%	Efisien
2019	1.776.147.006.513,00	2.112.858.325.000,00	84,06%	Efisien
2020	1.727.809.331.309,00	2.035.445.880.000,00	84,89%	Efisien
2021	1.756.972.447.254,00	2.022.353.558.000,00	86,88%	Efisien
2022	1.696.793.753.977,00	1.900.041.942.902,00	89,30%	Efisien
2023	1.858.135.702.478,00	1.965.365.358.063,00	94,54%	Efisien
2024	1.944.100.435.034,00	2.058.474.057.054,00	94,44%	Efisien
Rata-rata			87,02%	Efisien

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Kinerja keuangan Kabupaten Sukoharjo secara konsisten memenuhi kriteria "efisiensi" dengan rata-rata rasio sebesar 87,02% dari tahun 2015 hingga 2024. Secara kuantitatif, efisiensi ini ditunjukkan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan belanja yang selalu di bawah 100%. Meskipun rasio hampir 100%, ini menunjukkan bahwa penyerapan belanja belum produktif. Jadi, hal ini menyebabkan belanja operasi terus meningkat setiap tahun dan sulit dikurangi karena bersifat wajib dan rutin. Sementara itu, belanja modal justru sering tertunda atau sering dikorbankan secara nominal (Tabel 19).

Analisis Kesorasian Belanja

Tabel 19 Rasio Kesorasian Belanja

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi	Rasio Belanja Modal
2015	1.253.692.412.298,00	265.948.514.720,00	1.519.776.477.018,00	82,49%	17,50%
2016	1.322.576.105.898,00	327.611.459.445,00	1.650.404.440.343,00	80,14%	19,85%
2017	1.330.048.974.932,00	250.940.426.244,00	1.581.523.010.006,00	84,10%	15,87%
2018	1.352.189.143.281,00	388.468.318.338,00	1.740.840.296.519,00	77,67%	22,31%
2019	1.425.455.103.854,00	350.577.750.659,00	1.776.147.006.513,00	80,26%	19,74%
2020	1.424.856.112.004,00	238.738.380.776,00	1.727.809.331.309,00	82,47%	13,82%
2021	1.472.694.410.236,00	283.872.873.485,00	1.756.972.447.254,00	83,82%	16,16%
2022	1.476.279.908.868,00	220.460.187.459,00	1.696.793.753.977,00	87,00%	12,99%
2023	1.565.378.114.470,00	292.716.698.008,00	1.858.135.702.478,00	84,24%	15,75%
2024	1.709.135.538.150,00	234.714.674.156,00	1.944.100.435.034,00	87,91%	12,07%
Rata-rata				83,01%	16,61%

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Analisis keserasian belanja operasi dan belanja modal, hasil analisis keserasian belanja Kabupaten Sukoharjo 2015 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa struktur anggaran didominasi oleh belanja operasi, dengan rata-rata rasio 83,01%. Sebaliknya, alokasi belanja modal rata-rata jauh lebih rendah, sebesar 16,16%. Belanja operasi merupakan pengeluaran wajib yang bersifat mengikat yang memakan hampir setengah dari APBD secara keseluruhan, sehingga APBD masih sangat konsumtif. UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 146 mengarahkan agar belanja pegawai daerah tidak melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya adalah agar APBD lebih fokus pada belanja infrastruktur layanan publik dan peningkatan ekonomi daerah.

Analisis Pertumbuhan SiLPA

Tabel 20 Rasio Pertumbuhan SiLPA

Tahun	Realisasi SiLPA tahun t	Realisasi SiLPA pada tahun t-1	Rasio Pertumbuhan SiLPA	Hasil Kriteria
2015	366.310.929.362,00	237.259.384.450,00	54,39%	Positif
2016	289.621.352.709,00	366.310.929.362,00	-20,94%	Negatif
2017	467.281.226.364,00	289.621.352.709,00	61,34%	Positif
2018	310.182.333.525,00	467.281.226.364,00	-33,62%	Negatif
2019	288.889.894.161,00	310.182.333.525,00	-6,86%	Negatif
2020	358.453.599.194,00	288.889.894.161,00	24,08%	Positif
2021	361.794.953.754,00	358.453.599.194,00	0,93%	Positif
2022	304.412.025.326,00	361.794.953.754,00	-15,86%	Negatif
2023	233.237.051.521,00	304.412.025.326,00	-23,38%	Negatif
2024	174.566.280.022,00	233.237.051.521,00	-25,15%	Negatif
Rata-rata			1,49%	Positif

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Dinamika Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sukoharjo selama periode 2015 hingga 2024 mencerminkan pola pengelolaan keuangan daerah yang bergerak antara akumulasi cadangan kas dan peningkatan belanja. Dari sudut pandang positif, akumulasi SiLPA yang besar tersebut berarti pemerintah daerah memiliki cadangan kas yang melimpah yang dapat dialokasikan sebagai sumber pembiayaan untuk anggaran tahun berikutnya. Penurunan SiLPA ini belum tentu mengindikasikan defisit anggaran, karena realisasi pendapatan masih melampaui target efektivitas PAD >100%. Fenomena ini mencerminkan optimalisasi penyerapan belanja pada tahun-tahun sebelumnya yang berdampak pada mengecilnya surplus anggaran tahunan (Tabel 18).

Analisis Penggunaan Dana Cadangan

Tabel 21 Analisis Penggunaan Dana Cadangan

Tahun	Saldo Awal Tahun t-1	Pembentukan Dana Cadangan	Penggunaan Dana Cadang	Saldo Akhir
2015	-	-	-	-
2016	-	95.022.990.867	-	95.022.990.867
2017	95.022.990.867	50.250.614.873	44.772.375.994	100.501.229.746
2018	50.250.614.873	177.405.567.166	(127.154.952.293)	354.811.134.332
2019	177.405.567.166	51.267.751.298	126.137.815.868	102.535.502.596
2020	51.267.751.298	53.362.303.919	(2.094.552.621)	106.724.607.838
2021	53.362.303.919	55.210.770.461	(1.848.466.542)	110.421.540.922
2022	55.210.770.461	76.772.794.666	(21.562.024.205)	153.545.589.332
2023	76.772.794.666	66.401.157.584	10.371.637.082	132.802.315.168
2024	66.401.157.584	-	66.401.157.584	-

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti, 2025

Saldo dana cadangan mengalami fluktuasi yang signifikan secara kuantitatif. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2019, pengelolaan ini membentuk dana cadangan untuk kegiatan yang tidak dapat didanai dalam satu tahun anggaran, seperti pembangunan infrastruktur. Dinamika angka 'Positif' dalam laporan menunjukkan fase pembentukan atau penyisihan anggaran yang menunjukkan fiskal daerah dalam keadaan menabung untuk masa depan. Sebaliknya, angka "Negatif" dalam analisis ini menunjukkan bagaimana dana digunakan atau dicairkan sesuai dengan penggunanya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sukoharjo. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan pada bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang terdapat pada BPKPAD tahun 2015 sampai 2024. Setelah dilakukan berbagai analisis, Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kinerja yang sangat efektif, dengan rata-rata rasio efektivitas PAD mencapai 122,52% dan efektivitas pajak daerah 132,33%. Namun, di balik efektivitas tersebut, struktur pendapatan masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, dengan rasio ketergantungan rata-rata 74,49% (kategori sangat tinggi) dan rasio kemandirian hanya 30,21% (kategori cukup). Hal ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan PAD belum mampu

menggeser dominasi transfer. Efisiensi belanja secara administratif yang tinggi mencapai 94,44% tidak diikuti oleh penyerapan anggaran yang tidak seimbang karena penyerapan didominasi oleh belanja operasi sehingga lebih banyak untuk kegiatan rutin dan konsumtif.

Efisiensi secara administratif tercermin dari rata-rata rasio efisiensi 87,02% yang berarti realisasi belanja selalu di bawah anggaran. Namun, efisiensi ini bersifat timpang karena lebih banyak disebabkan oleh penurunan belanja modal. Akibatnya, struktur belanja timpang dengan dominasi belanja operasi mencapai 83,01%, sementara belanja modal hanya 16,22%. Rendahnya belanja modal berdampak pada terbatasnya efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan stagnasi kualitas infrastruktur publik, sehingga produktivitas belanja daerah belum optimal. SiLPA dikelola dengan tren menurun seiring meningkatnya realisasi belanja, yang mengindikasikan perbaikan penyerapan anggaran. Dana cadangan dibentuk pada tahun-tahun surplus dan dicairkan saat dibutuhkan. Dana cadangan hadir sebagai instrumen untuk mengatasi keterbatasan tersebut, memungkinkan daerah tetap melakukan investasi fisik meskipun SiLPA sedang menipis.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbarui tahun anggaran ke tahun terbaru yang belum terdapat pada tahun penelitian. Dengan menggunakan sampel di luar Kabupaten Sukoharjo, bisa membandingkan riset dengan daerah lain. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan pengaruh antarvariabel keuangan menggunakan uji hipotesis untuk menjelaskan hubungan yang diuji secara statistik. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan indikator sebagai variabel hipotesis agar dapat diketahui seberapa besar pengaruh analisis tersebut terhadap kinerja keuangan daerah.

REFERENSI

- Aminatuzzuria, M., Rahmawati, S., Anam, R., & Djasuli, M. (2025). Analisis Keterkaitan Antara Dana Cadangan dan Aset Publik Terhadap Good Governance. *Jurnal Maneksi*, 14(2), 728–738.
- Dalisawintri, Noor, M., & Irawan, B. (2025). *Strategi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)* (ed. ke-1). PT. Nas media Indonesia.
- Darmawan, I. M. D. H. (2023). Membedah Prinsip Pelaporan Konservatisme Akuntansi: Pro Kontra, Kegunaan dan Pertimbangan Untuk Pemangku Kepentingan. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 410–416. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1531>.
- Jensen & Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics* 3(4), 305–360.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (ed. ke-4). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (ed. ke-2). Andi.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90>.
- Pasaribu, E. (2021). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan derajat desentralisasi fiskal. *Akuntabilitas*, 15(1), 137–154. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.12054>.
- Patiroi, A. (2019). Analisis kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. *Journal of Economic Resources*, 2(2), 88-101.



- Rahmayati, A. (2016). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2013. *Jurnal Eka Cida*, 1(1), 40–54.
- Sari & Riharjo. (2020). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(8), 1-16.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (ed. ke-2). Alfabeta. <https://doi.org/444>.
- Tri, Cahyono. (2018). *Statistika terapan dan indikator kesehatan* (ed. ke-1). Deepublis CV. Budi Utama.
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>.